



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PROFIL GENDER TAHUN 2020



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku “ Profil Gender Tahun 2020” . Serta Shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota .

Dalam penusunan buku ini kami memperoleh dukungan / bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengaturkan terima kasih kepada berbagai Instansi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan Informasi gender sesuai Tupoksi masing-masing.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan

Tanjung Pati, Juli 2020

Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Lima Puluh Kota

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
NIP.19751126 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Sumber Data.....	3
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH	
2.1 Letak Administratif.....	4
2.2 Situasi Geografis.....	5
BAB III : KEPENDUDUKAN	
3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	7
3.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	9
BAB IV : PENDIDIKAN	
4.1 Angka Partisipasi Kasar.....	12
4.2 Angka Partisipasi Murni.....	14
BAB V : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
5.1 Angka Harapan Hidup.....	18
5.2 Angka Kematian Ibu.....	18
5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan.....	20
5.4 Penderita HIV dan AIDS.....	21
5.5 Keluarga Berencana.....	21

BAB VI	: PEREMPUAN DISEKTOR PUBLIK	
6.1	Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif.....	23
6.2	Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.....	25
6.3	Partisipasi Perempuan di Bidang Yudikatif.....	32
6.4	Organisasi Perempuan.....	33
BAB VII	: EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN	
7.1	Penduduk dengan Kegiatan Utama.....	37
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	38
7.3	Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin.....	39
7.4	Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin.....	40
BAB VIII	: HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	
8.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	41
8.2	Penduduk Lanjut Usia.....	42
8.3	Penyandang Cacat	43
8.4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.....	44
8.5	Perempuan Kepala Rumah Tangga.....	46
BAB IX	: PENUTUP	
9.1	Kesimpulan.....	48
9.2	Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II : KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
2.1 Rencana Kegiatan.....	5
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Realisasi Kegiatan.....	8
3.2 Permasalahan.....	13
3.3 Upaya penyelesaian masalah.....	14
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, Millenium Development Goals (MDG'S) dan berlanjut ke Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender (IDG). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan manusia indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) , indek pembangunan gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya mengamanatkan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang (5,7%) --perempuan, padahal 50,3 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak. Dengan tersedianya data gender dan anak yang terpilah menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan anak. Dengan tersedianya data yang tepat dan akurat maka akan memudahkan dalam melahirkan perencanaan yang responsif gender dan anak.

Dengan disusunnya buku perspektif gender dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak

anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, OPD baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71” LU dan 0022’14,52” LS serta antara 100015’44,10” – 100050’47,80” BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu ;Kabupaten Agam , Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 KM² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luhak yaitu : 61,68 KM². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 M), Gunung Bungsu (1.253 M), Gunung Sanggul (1.495 M) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / Irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau.Dari 13 Kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 Nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 Nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Luhak
5. Kecamatan Lareh Sago Halaban

6. Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguak
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 Situasi Geografis

Secara Geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawahlunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuh Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dangung-dangung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m . Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 Km, Batu sangkar Km, Painan 211 Km, Lubuak Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padng Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuh Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tanjung Pati 2 Km, Dangung-dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 tercatat sebanyak 382.817 jiwa, dengan rincian 190.298 jiwa penduduk laki-laki dan 192.519 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,85 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Dengan rasio jenis kelamin adalah 98,85%, maka angka ini memperlihatkan bahwa pada umumnya di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah yang relatif lebih banyak ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan di kabupaten lima puluh kota, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntutan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1				
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin				
Tahun 2019				
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio jenis Kelamin
1	Payakumbuh	17,515	17,816	98,31
2	Akabiluru	13,560	13,913	97,46
3	Luhak	13,636	14,053	97,03
4	Lareh Sago Halaban	18,795	19,191	97,94

5	Situjuah Limo Nagari	10,784	11,257	95,80
6	Harau	27,539	27,044	101,83
7	Guguak	17,967	19,000	94,56
8	Mungka	13,476	13,834	97,41
9	Suliki	7,516	7,994	94,02
10	Bukik Barisan	11,567	11,996	96,42
11	Gunuang Omeh	6,784	6,760	100,36
12	Kapur IX	15,435	14,546	106,11
13	Pangkalan Koto Baru	15,724	15,115	104,03
	Kabupaten	190,298	192,519	98,85
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Pada daerah-daerah tertentu juga ditemukan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Daerah tersebut adalah kecamatan Harau (27.539) dan Gunuang Omeh (6.784)serta Pangkalan Koto Baru (15.724). Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah pada daerah-daerah perkebunan.

Tabel 3.2

Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas /Area (km ²)	Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Payakumbuh	99,47	35.305	355
2	Akabiluru	94,26	27.495	292
3	Luak	61,68	27.692	449
4	Lareh Sago Halaban	394,85	37.973	96
5	Situjuah Limo Nagari	74,18	22.051	297
6	Harau	416,80	51.232	123
7	Guguak	106,20	36.971	348
8	Mungka	83,76	27.304	326

9	Suliki	136,94	15.516	113
10	Bukik Barisan	294,20	23.594	80
11	Gunuang Omeh	156,54	13.554	87
12	Kapur IX	723,36	29.977	41
13	Pangkalan Koto Baru	712,06	30.850	43
	Kabupaten	3354.30	379.514	113
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 mencapai 113 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luhak dengan tingkat kepadatan sebesar 449 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 41 jiwa per km². Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 tercatat sebesar 95.178. Maka rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2018 tercatat sebesar 4 jiwa per rumah tangga.

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 3.3				
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur				
Tahun 2019				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	19.102	18.192	37.294
2	5-9	19.458	18.600	38.058
3	10-14	17.952	16.710	34.662
4	15-19	14.793	13.038	27.831
5	20-24	12.065	11.609	23.674
6	25-29	13.292	13.376	26.668
7	30-34	14.644	14.476	29.120
8	35-39	13.661	14.014	27.675
9	40-44	12.538	12.470	25.008
10	45-49	11.194	11.195	22.389
11	50-54	9.967	11.070	21.037
12	55-59	9.471	10.984	20.455
13	60-64	8.821	9.541	18.362

14	65-69	6.438	6.868	13.306
15	70-74	3.382	4.395	7.777
16	75 +	3.520	5.981	9.501
	Kabupaten	190.298	192.519	382.817
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 5 s/d 9 tahun dengan jumlah sebanyak 38.058 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 7.777 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (25-29 tahun, 35-39 tahun,) ternyata jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 45-64, juga menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja.

BAB IV PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi Perempuan dan Anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun. Indikator Pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang dtamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah Penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai Kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan menghasilkan anak –anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada BAB ini. Data dan Informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang

pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APK dan APM usia 7-12 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah APK dan APM Peserta Didik SD berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik Keseluruhan	Jumlah Peserta Didik Umur 7-12 Tahun	Penduduk Usia Sekolah	APK	APM
1	Kec. Akabiluru	2.990	2.692	3.575	83,64	75,30
2	Kec. Bukik Barisan	2.424	2.121	2.480	97,74	85,52
3	Kec. Guguak	4.162	3.786	4.557	91,33	83,08
4	Kec. Gunuang Omeh	1.633	1.410	1.591	102,64	88,62
5	Kec. Harau	6.339	5.613	6.646	95,38	84,46
6	Kec. Kapur IX	3.227	2.869	3.858	83,64	74,36
7	Kec. Lareh Sago Halaban	4.440	3.997	4.362	101,79	91,63
8	Kec. Luak	2.468	2.253	3.180	77,61	70,85
9	Kec. Mungka	3.299	2.850	3.386	97,43	84,17
10	Kec. Pangkalan Koto Baru	3.462	3.050	4.167	83,08	73,19
11	Kec. Payakumbuh	3.650	3.278	4.586	79,59	71,48
12	Kec. Situjuh Limo Nagari	2.383	2.103	2.787	85,504	75,46
13	Kec. Suliki	1.527	1.363	1.891	80,75	72,78
	Kab.Lima Puluh Kota	42.004	37.385	47.066	89,24	79,43

Dari tabel diatas dapat dilihat data APK untuk SD (usia 7-12 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Luhak (77,61%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Gunuang Omeh (102,64%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka Angka Partisipasi Kasar (APK) Peserta Didik usia 7-12 tahun berada pada angka (89,24%).

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK

mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

Berdasarkan data dari tabel diatas, juga dapat dilihat Angka Patisipasi Murni (APM) Peserta Didik SD usia 7-12 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka (79,43%). APM terendah adalah Kecamatan Luhak (70,85%) sedangkan APM tertinggi dimiliki Kecamatan Lareh Sago halaban (91,63%)

Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

V.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

V.2. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019 didapatkan jumlah kematian sebanyak 11 kasus. (170/100.000) kelahiran hidup.

Tabel V.1
Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

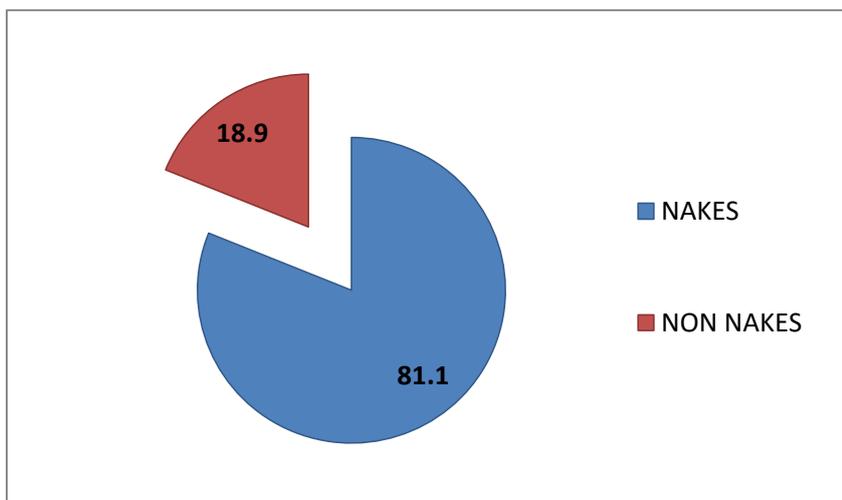
No.	KECAMATAN	BAYI	ANAK	IBU MELAHIRKAN
1	Payakumbuh	9	0	1
2	Akabiluru	3	0	0
3	Luak	2	2	0
4	Lareh Sago Halaban	2	1	0
5	Situjuah Limo Nagari	6	0	1
6	Harau	12	3	2
7	Guguak	3	2	1
8	Mungka	3	1	2
9	Suliki	1	0	2
10	Bukik Barisan	6	0	0
11	Gunuang Omeh	5	1	1
12	Kapur IX	4	0	0
13	Pangkalan Koto Baru	4	0	1
	Kabupaten	60	10	11
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

V.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu seperti pengetahuan, sikap terhadap pemilihan penolong persalinan, untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan kepelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tidak berkualitas, dan perilaku tenaga kesehatan yang tidak ramah.

Gambar. 5.2
Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019



V.4 Penderita HIV dan AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya / hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual, disamping itu juga bisa melalui darah/ produk darah (misalnya tranfusi, suntikan, tindakan medis dll) serta dari ibu yang terinfeksi kepada janin/ bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 provinsi. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.

V.5 KELUARGA BERENCANA.

Jumlah akseptor KB Baru tahun 2019 adalah 7.667 (80,4%) akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya. Sementara Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai akseptor Baru tahun 2019 adalah dengan Suntik sebanyak 3.311 (83,6%) , kemudian Pil KB sebanyak 1.608 (89,2%). Seperti Tabel V.3 di bawah ini :

Tabel V.3
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) PER KECAMATAN TAHUN 2019

No	Kecamatan	PPM	KUMULATIF PESERTA KB BARU																								
			Ppm Per Mixkontrasepsi							IUD		MOW		MOP		IMP		JML MKJP		KDM		ST		PIL		TOTAL	
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	ST	PIL	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%
1	Suliki	305	97	52	0	11	61	55	29	60	61,9	55	105,8	2	0	24	39,3	141	46,2	0	0	41	74,5	13	44,83	195	63,9
2	Bukik Barisan	687	68	3	0	98	87	258	173	24	35,2	1	33,3	0	0	36	41,4	61	8,9	122	124,5	210	81,4	102	59,0	495	72,0
3	Gunuang Omeh	353	25	12	2	19	88	129	78	27	108,9	0	0	0	0	40	45,5	67	19,0	21	110,5	133	103,1	104	133,3	325	92,1
4	Guguak	715	62	1	2	81	142	256	171	62	100,5	0	0	0	0	93	65,5	155	21,7	21	25,9	228	89,1	88	51,5	492	68,8
5	Mungka	700	35	1	10	123	90	269	172	20	56,7	0	0	0	0	65	72,2	85	12,1	138	112,2	192	71,4	172	100	587	83,8
6	Payakumbuh	1.049	66	5	4	195	195	414	170	15	22,7	0	0	3	75	172	88,2	190	18,1	63	32,3	385	93	97	57,1	735	70,1
7	Akabiluru	749	76	4	0	85	85	332	167	84	110,2	6	150	1	0	86	101,2	32	4,3	80	94,1	313	94,3	152	91	722	96,4
8	Luak	765	147	3	2	57	108	360	88	102	69,3	0	0	0	0	66	61,1	168	22	105	184,2	355	98,6	204	231,8	832	108,7
9	Lareh Sago Halaban	996	47	1	2	86	134	561	165	18	38,4	0	0	0	0	65	48,5	83	8,3	42	48,8	134	23,9	69	41,8	328	32,9
10	Situjuhah	563	170	8	5	46	88	188	58	146	85,9	5	62,5	0	0	101	114,8	252	44,8	39	84,8	151	80,3	44	75,9	486	86,3
11	Harau	1.209	143	17	0	91	94	536	328	87	60,8	13	76,5	1	0	132	140,4	233	19,3	73	80,2	565	105,4	291	88,7	1162	96,1

12	Pangkalan	703	46	7	1	92	132	319	106	30	65,1	1	14,29	1	100	32	24,2	64	9,1	38	41,3	259	81,2	64	60,4	425	60,4
13	Kapur IX	738	62	6	1	71	216	285	97	18	29,1	0	0	0	0	226	104,6	244	33,1	86	121,1	345	121,1	208	214,4	883	119,7
KABUPATEN		9.533	1.045	120	29	1.055	1.520	3.962	1.802	693	66,3	81	67,5	8	27,6	1.138	74,9	1.920	20,1	828	78,5	3.311	83,6	1.608	89,2	7.667	80,4
SUMBER DATA :		DARI DP2KBP3A KAB.LIMA PULUH KOTA																									

Tabel V.4
PENCAPAIAN PESERTA AKTIF (PA) PER KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	SSRN	KUMULATIF PESERTA KB AKTIF											PUS BUKAN PESERTA KB								KET		
			IUD	MOW	MOP	IMP	JML CPR MKJP		KDM	ST	PIL	TOTAL		UNMET NEED				JML	%					
			KUM	KUM	KUM	KUM	KUM	%	KUM	KUM	KUM	KUM	%	HAMIL	%	IAS	%	IAT	TIAL	JML	%			
1	SULIKI	2024	210	120	14	142	486	35,89	66	620	182	1354	66,90	77	3,80	181	8,94	198	214	412	20,36	670	33,10	
2	BUKIK BARISAN	3.558	130	65	0	214	409	14,32	164	1.904	380	2.857	80,30	106	2,98	317	8,91	162	116	278	7,81	701	19,70	
3	GUNUANG OMEH	2.018	83	88	0	211	382	26,60	36	618	400	1.436	71,16	86	4,26	303	15,01	91	102	193	9,56	582	28,84	
4	GUGUAK	4.326	368	149	7	339	863	25,37	173	2.004	361	3.401	78,62	153	3,54	306	7,07	253	213	466	10,77	925	21,38	
5	MUNGKA	4.107	142	100	6	343	591	20,57	200	1.730	352	2.873	69,95	269	6,55	388	9,45	308	269	577	14,05	1.234	30,05	

BUKU PROFIL GENDER | 2020

6	PYAKUMBUH	5.340	244	191	37	751	1.223	31,46	164	1.989	512	3.888	72,81	226	4,23	485	9,08	408	333	741	13,88	1.452	27,19
7	AKABILURU	3.489	222	88	13	268	591	22,73	99	1.593	317	2.600	74,52	144	4,13	310	8,89	195	240	435	12,47	889	25,48
8	LUAK	4.174	321	115	7	224	667	22,74	125	1.760	381	2.933	70,27	181	4,34	371	8,89	347	342	689	16,51	1.241	29,73
9	LAREH SAGO HALABAN	6.017	206	112	7	509	834	18,80	195	2.874	532	4.435	73,71	270	4,49	592	9,84	381	339	720	11,97	1.582	26,29
10	SITUJUAH	3.365	713	90	7	366	1.176	46,61	127	968	252	2.523	74,98	170	5,05	315	9,36	131	226	357	10,61	842	25,02
11	HARAU	8.925	704	266	29	703	1.702	26,64	265	3.437	985	6.389	71,59	340	3,81	855	9,58	830	511	1.341	15,03	2.536	28,41
12	PANGKALAN	4.513	173	117	5	495	790	24,19	110	1.948	418	3.266	72,37	217	4,81	448	9,93	292	290	582	12,90	1.247	27,63
13	KAPUR IX	4.809	111	38	2	652	803	22,46	162	1.642	968	3.575	74,34	178	3,70	371	7,71	355	330	685	14,24	1.234	25,66
KABUPATEN		56.665	3.627	1.539	134	5.217	10.517	25,32	1.886	23.087	6.040	41.530	73,29	2.417	4,27	5.242	9,25	3.951	3.525	7.476	13,19	15.135	26,71
SUMBER DATA		DARI DP2KBP3A KAB.LIMA PULUH KOTA																					

Dari Tabel V.4 diatas dapat kita lihat Jumlah akseptor KB aktif tahun 2019 adalah 41,530 (73,29%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2018 tercatat sebanyak 41,048 (72,74%) akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya. Sementara Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2019 adalah dengan Suntik sebanyak 23, kemudian Pil KB sebanyak 6.040

V.6. USIA PERKAWINAN PERTAMA

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

Jika kita lihat jumlah perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bab III didapatkan jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Dan juga jumlah penduduk pada usia 35-39 dan 45-49, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik. Untuk itu Perempuan tidak hanya harus berperan di ranah domestik tetapi peranan perempuan diranah publik akan diuraikan dibawah ini.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau kebijakan yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019

No	Partai Politik	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
2	Partai Nasdem	1	0	1
3	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
4	Partai Gerindra	6	0	6
5	Partai PDI Perjuangan	2	0	2
6	Partai Golongan Karya	5	0	5
7	Partai Demokrat	5	0	5
8	Partai Amanat Nasional	3	0	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	1	4
11	Partai Bulan bintang	0	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	33	2	35

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel VI.1.a
Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2019
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE PEREMPUAN
1	Kab. Lima Puluh Kota	33	2	35	5,71 %
Jlh		33	2	35	5,71 %

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel VI.1.a terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebanyak 2 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2019 adalah 5,71%, jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga Eksekutif. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Tabel 6. 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Unit Kerja		Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sekretariat Daerah				
	1.	Bagian Tata Pemerintahan Umum	4	5	9
	2.	Bagian Hukum	1	4	5
	3.	Bagian Orgnisasi	5	6	11
	4.	Bagian Kerjasama	4	2	6
	5.	Bagian Pengadaan Barang / jasa	4	4	8
	6.	Bagian Perekonomian	4	2	6
	7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	2	9
	8.	Bagian Umum dan Perlengkapan	25	11	36
	9.	Bagian Keuangan	8	4	12
	10.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan	3	3	6
2	Sekretariat DPRD		25	5	30
3	Sekretariat KPU		4	2	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja		35	10	45
5	Inspektorat		26	20	46
6	BADAN				
	1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	16	14	30
	2.	BKPSDM	27	17	43
	3.	Badan Keuangan	39	28	67
	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	5	29
	5.	Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik	25	6	31

7	DINAS			
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	108	92	200
	Guru Tk/SD/SMP	782	2.719	3.501
.	Jaga & TU SD/SMP	96	45	141
2.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	24	18	42
3.	Dinas Kesehatan	22	67	89
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77	9	86
5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	46	73	119
6.	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	38	38	76
7.	Dinas Perikanan	7	17	24
8.	Dinas Pangan	9	9	18
9.	Dinas Perhubungan	41	4	45
10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	14	16	30
11.	Dinas Sosial	13	15	28
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9	21	30
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	10	23
14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	30	9	39
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	15	12	27
16.	Dinas Pemadam Kebakaran	35	1	36
17.	Dinas PM & PTSP	15	19	34
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22	11	36
19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16	12	28
20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak	10	22	32
8	KECAMATAN			
1.	Kantor Camat Payakumbuh	9	8	17
2.	Kantor Camat Suliki	4	11	15
3.	Kantor Camat Guguak	8	10	18
4.	Kantor Camat Bukit Barisan	10	2	12

	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	14	5	19
	6.	Kantor Camat Situjuh Limu Nagari	10	4	14
	7.	Kantor Camat Akabiluru	9	7	16
	10.	Kantor Camat Harau	14	7	21
	11.	Kantor Camat Mungka	5	6	11
	12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	9	5	14
	13.	Kantor Camat Kapur IX	18	4	22
9	RSUD Achmad Darwis		37	145	182
10	Puskesmas		71	626	697
11	Instalasi Farmasi		5	3	8
TOTAL			1.960	4.247	6.207

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.2 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.247 ASN Perempuan (68,42%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 1.960 orang (31,58%) . Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sarasannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program. Namun jika dilihat minimal keterlibatan perempuan pada sektor publik adalah 30% belum tercapai .

Tabel 6.2.a
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2019

Dinas - Instansi / Office - Institutions			Golongan / Groups				
			I	II	III	IV	Jml / Total
1	Sekretariat Daerah						
	1.	Bagian Tata Pemerintahan Umum		2	4	3	9
	2.	Bagian Hukum			4	1	5
	3.	Bagian Orgnisasi		2	8	1	13
	4.	Bagian Kerjasama			5	1	6
	5.	Bagian Pengadaan barang dan jasa			7	1	8
	6.	Bagian Perekonomian		1	3	2	6
	7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat		2	6	1	9
	8.	Bagian Umum dan Perlengkapan	3	13	12	8	36
	9.	Bagian Keuangan			11	1	12
	10.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan			5	1	6
2	BADAN						-
	1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		2	22	6	30
	2.	BKPSDM		2	38	4	44
	3.	Badan Keuangan		15	44	8	67
	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8	15	8	31
	5.	Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik		4	17	5	26
3	DINAS						-
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	22	88	89	200
	2.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga		5	31	6	42

	3.	Dinas Kesehatan		9	67	13	89
	4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	24	53	7	86
	5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan		22	81	16	119
	6.	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan		15	51	10	76
	7.	Dinas Perikanan		1	16	7	24
	8.	Dinas Pangan		2	10	6	18
	9.	Dinas Perhubungan	1	21	18	5	45
	10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	1	1	19	9	30
	11.	Dinas Sosial		6	14	8	28
	12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		3	22	5	30
	13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1	14	8	23
	14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1	4	25	9	39
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari		7	16	4	27
	16.	Dinas Pemadam Kebakaran	2	12	16	6	36
	17.	Dinas PM & PTSP		1	23	10	34
	18.	Dinas Komunikasi dan Informatika		1	25	7	33
	19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		3	19	6	28
	20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak	1	4	22	5	32
4	KECAMATAN						-
	1.	Kantor Camat Payakumbuh		6	9	2	17
	2.	Kantor Camat Suliki		6	6	3	15
	3.	Kantor Camat Guguak		5	11	2	18
	4.	Kantor Camat Bukit Barisan		4	6	2	12
	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	1	8	8	2	19
	6.	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari		5	8	1	14

7.	Kantor Camat Akabiluru		6	8	2	16	
8.	Kantor Camat Gunuang Omeh		2	8	1	11	
9.	Kantor Camat Luak		4	9	3	16	
10.	Kantor Camat Harau		11	8	2	21	
11.	Kantor Camat Mungka		2	8	1	11	
12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		7	6	1	14	
13.	Kantor Camat Kapur IX		8	11	3	22	
5	Sekretariat DPRD		9	18	3	30	
6	Sekretariat KPU		2	3	1	6	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	16	22	6	45	
8	Inspektorat		1	36	9	46	
9	RSUD Achmad Darwis	2	34	138	8	182	
10	Puskesmas	2	205	457	33	697	
11	Instalasi Farmasi	1	1	5	1	8	
12	Guru TK/SD/SMP		90	1.817	1.594	3.501	
13	Jaga/TU SD/SMP	13	82	45	1	141	
TOTAL			32	729	3.478	1.968	6.207

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dengan jumlah pegawai pada tahun 2019 adalah sebanyak 6.207 orang, yang terdiri dari 1.960 orang laki-laki dan 4.247 orang perempuan..Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 32 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 729 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.478 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 1.968 orang.

6.3 Partisipasi Perempuan di bidang Yudikatif

Tabel 6.3 a
Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2019

No	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kementerian Agama	0	69	288	63	420
2	Kantor Pertanahan	0	4	20	2	26
3	Pengadilan Negeri	0	4	23	1	28
4	Kejaksaan Negeri	0	3	33	1	37
5	Badan Pusat Statistik	0	3	21	1	25
6	Pengadilan Agama	0	1	19	2	22
	JUMLAH	3	89	376	75	558

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Tabel 6.3 b
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal
di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kementerian Agama	148	272	420
2	Kantor Pertanahan	12	14	26
3	Pengadilan Negeri	17	11	28
4	Kejaksaan Negeri	20	17	37
5	Badan Pusat Statistik	16	9	25
6	Pengadilan Agama	6	16	22
	TOTAL	219	339	558

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Dari Tabel 6.3b dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 berjumlah 558 orang, dimana dapat dilihat perbandingan antara ASN Perempuan 339 orang (60,75%) sedangkan ASN Laki-laki berjumlah 219 orang (39,25%)

Disini dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih mendominasi pada sektor Eksekutif Instansi Vertikal di banding laki-laki .

6.4 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan di segala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut . Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.4
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

No	NAMA ORGANISASI PEREMPUAN
1	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW)
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh
5	Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama
6	DWP Unit Kesehatan
7	DWP Politani
8	DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota
9	DWP Unit Dinas Pendidikan
10	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11	Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah
12	Persit Bataliyon
13	Persit Kodim
14	Persit Denzipur
15	Bhayangkari Cabang 50 Kota
16	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
17	Aisyah
18	Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati)
19	Ikatan Guru TK Indonesia

20	Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ika Boga)
21	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota
22	Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota
23	Pimpinan Wilayah Nasyiatul Asyiah
24	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
25	Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA)
26	Puti Bonsu
27	Ikatan Dokter Indonesia
28	Komisi Lanjut Usia
29	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
30	Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
31	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
32	Forum Kabupaten Sehat
33	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lima Puluh Kota
34	Muslimat NU
35	Persaudaraan Muslima (SALIMAH)
36	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
37	Badan Kontak Majelis Ta;lim (BKMT)
38	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
39	Persatuan Analis Gizi (Persagi)
40	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Sumber Data : DP2KBP3A Kab.LPK

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara-neagara di dunia, berbagai penelitian tentang permasalahan yang dihadapi negara berkembang telah dilakukan termasuk diantaranya oleh Todaro (1987) dan Nafziger (1990). Penelitian itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama di negara berkembang adalah adanya ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pengurangan pengangguran, karena hal ini sangat tergantung pada bagaimana memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena secara teori pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 500 ribu pekerja.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut SDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. Indikator ini juga memungkinkan diketahuinya permasalahan yang akan muncul apabila ketenagakerjaan bermasalah. Misalnya banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dapat menimbulkan pengangguran yang pada gilirannya akan berdampak baik secara ekonomi maupun sosial. Dibandingkan dengan laki-laki perempuan relatif sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Oleh karena itu kebanyakan perempuan bekerja disektor informal.

Jika kita lihat Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 tercatat sebanyak 382.817 jiwa, dengan rincian 190.298 jiwa penduduk laki-laki dan 192.519 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,85 persen.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2018 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 196.760 jiwa dengan rincian 191.453 jiwa bekerja dan sebesar 5.307 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2018 sebesar 73.300 jiwa dengan rincian sebanyak 21.144 jiwa sedang bersekolah, 37.262 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.893 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1

Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2019				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	115.869	83.557	199.426
	a. Bekerja	112.947	81.941	194.888
	b. Pengangguran	2.922	1.616	4.538
II	Bukan Angkatan Kerja	21.662	51.638	73.300
	a. Sekolah/Attending School	8.671	11.040	19.711
	b. Mengurus RT/House Keeping	2.091	40.001	42.092
	c. Lainnya/others	7.473	4.721	12.194
	JUMLAH	134.104	139.319	273.423

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 4.001. Jika dilihat persentasi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk, persentasi laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 60,89 % laki-laki dan 40,43 % Perempuan. Kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2

Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2019				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	115.869	83.557	199.426
	c. Bekerja	112.947	81.941	194.888
	d. Pengangguran	2.922	1.616	4.538
	Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop	60,89	43,40	52,09
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active	86,40	59,98	72,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate	2,52	1,93	2,28

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2008 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 86,40 laki-laki dan 59,98 perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	15-24	12.118	7.084	19.202
2	25-29	12.981	9.359	22.340
3	30-34	13.150	10.060	23.210
4	35-44	25.581	20.415	45.996
5	45-54	20.261	17.837	38.098

6	55-59	8.549	7.239	15.788
14	60+	15.151	11.668	26.819
Jumlah	2018	107.791	83.662	191.453

Sumber Data : BPS Kab.LPK

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (83.315 orang) dan pertambangan / penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan dll (23.650 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (16.457 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel 7.4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya Tahun 2019				
NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan,Perikanan dll	54.363	30.744	85.107
2	Pertambangan dan Penggalian, listrik,gas dan air, bangunan angkutan dll	19.652	3.249	22.901
3	Industri/ Manufacture	7.340	13.531	20.871
4	Perdagangan, Rumah makan,hotel, restourant dll	23.654	23.347	47.001
5	Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan	7.938	11.070	19.008
Total		112.947	81.941	194.888

Sumber Data : BPS Kab.LPK

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindunga hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklerasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan . Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahn 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri

TABEL 8.1
PENGHUNI RUTAN SULIKI MENURUT STATUS PENAHANAN
TIDAK TERMASUK RESIDIVIS DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019

No	Kejahatan / Pelanggaran	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencurian	7	-	7
2	Penculikan	-	-	-
3	Kesusilaan	1	-	1
4	Perjudian	1	-	1
5	Narkotika	28	-	28
6	Lain-lain	23	-	23
7	Perlindungan Anak	10	-	10
	JUMLAH	70	-	70

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 70 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Laki-laki . Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 kasus kejahatan di Rutan Suliki Meningkat . Pada Tahun 2018 Kasus kejahatan sebanyak 41 Kasus.

8.2 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai

budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

TABEL 8.2
JUMLAH LANSIA DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA YANG POTENSIAL DAN TIDAK POTENSIAL TAHUN
2019

No	Kabupaten	Jumlah Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial	Lansia Produktif
	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.984 orang	30 orang

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

8.3 Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat .

Dibawah ini ditampilkan tabel jumlah penyandang disabilitas menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

TABEL 8.3
JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KELOMPOK UMUR DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019

No	Kelompok Umur	Penduduk Penyandang Cacat		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 9	3	3	6
2	10 - 14	103	74	177
3	15 - 19	147	91	238
4	20 - 24	106	97	203
5	25 - 29	128	84	212
6	30 - 34	128	72	200
7	35 - 39	218	125	343
8	40 - 44	185	148	333
9	45 - 49	189	128	317
10	50 - 54	137	119	256
11	55 - 59	149	123	272
12	60 - 64	112	114	226
13	65 +	321	480	801
	JUMLAH	1.926	1.658	3.584

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebanyak 3.584 orang, artinya penyandang cacat dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

TABEL 8.4
JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KELOMPOK UMUR DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018

No	Kecamatan	Yatim Piatu / Anak terlantar yang ada di panti	Disabilitas	
			Belum dibantu	Di bantu
1	Payakumbuh			2
2	Akabiluru			2
3	Luak			21
4	Lareh Sago Halaban			23
5	Situjuah Limo Nagari			
6	Harau			
7	Guguak			
8	Mungka			
9	Suliki			
10	Bukik barisan			
11	Gunuang Omeh			
12	Kapur IX			1
13	Pangkalan Koto Baru			
Kabupaten Lima Puluh Kota				49

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang telah dibantu adalah 49 dan Kecamatan yang tertinggi mendapatkan bantuan adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban.

8.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18-59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama . Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali

TABEL 8.4
JUMLAH KELUARGA MISKIN YANG MENERIMA BANTUANSOSIAL PANGAN
(RASTRA-BPNT) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2015-2019

	Kecamatan	Jumlah KK Penerima Raskin				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Payakumbuh	2.173	2.173	2.056	2.056	2.048
2.	Akabiluru	1.919	1.919	1.776	1.776	1.776
3.	Luak	1.892	1.892	1.684	1.684	1.681
4.	Lareh Sago Halaban	2.863	2.863	2.626	2.626	2.623
5.	Situjuah Limo Nagari	1.503	1.503	1.355	1.355	1.355
6.	Harau	3.060	3.060	2.888	2.888	2.908
7.	Guguak	1.737	1.737	1.432	1.432	1.432
8.	Mungka	1.256	1.256	1.213	1.213	1.212
9.	Suliki	1.072	1.072	929	929	930
10.	Bukik Barisan	2.726	2.726	2.116	2.116	2.115

11.	Gunuang Omeh	1.267	1.267	1.149	1.149	1.148
12.	Kapur IX	1.849	1.849	1.600	1.600	1.599
13.	Pangkalan Koto Baru	1.629	1.629	1.627	1.627	1.624
	Kabupaten Lima Puluh Kota	24.946	24.946	22.451	22.451	22.451

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Kepala Keluarga yang dapat Raskin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 = 24.946 KK, 2016 = 24.946 KK, 2017 = 22.451 KK , 2018 = 22.451 KK dan 2019 = 22.451 KK. Sedangkan yang terbanyak menerima bantuan RASKIN adalah Kecamatan Harau dan Tahun 2019 Kecamatan Harau mendapatkan Raskin berjumlah 2.908 KK.

Kecamatan yang paliang sedikit menerima Bantuan Raskin adalah Kecamatan Suliki . Pada Tahun 2019 Kecamatan Suliki menerima bantuan Raskin = 930 KK

8.5 Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang / penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan / dianggap / ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki, namun demikian bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data susenas Maret 2016 pada tabel 8.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26%), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga

perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

TABEL 8.5
PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			KETERANGAN
		Usia dibawah 45 th	Usia 45-59 th	Usia 60 th keatas	
1	Harau	133	259	608	
2	Situjuah	52	133	259	
3	Akabiluru	71	123	249	
4	Mungka	17	50	72	
5	Payakumbuh	135	182	437	
6	Lareh Sago Halaban	111	183	656	
7	Bukik Barisan	52	157	470	
8	Suliki	22	57	92	
9	Guguak	76	64	107	
10	Gunuang Omeh				
11	Luak	10	16	11	
12	Pangkalan				
13	Kapur IX				
	JUMLAH	679	1.224	2.961	

BAB IX

PENUTUP

IX.1 KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk Perempuan lebih banyak di bandingkan laki-laki, yaitu 192.519 (50,29%) perempuan sedangkan laki-laki 190.298 (49,70%)
2. Daerah atau Kecamatan yang lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan adalah Kecamatan Harau, Pangkalan , Gunuang Omeh.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 7-12 tahun berada pada angka 89,24%
4. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten usia 7-12 tahun berada pada angka 79,43 %.
5. Jumlah kematian ibu tahun 2019 sebanyak 11 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang berjumlah 2 kasus
6. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.(Masih menggunakan data tahun 2018.
7. Jumlah akseptor KB aktif tahun 2019 adalah 41.530 (73,29%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2018 tercatat sebanyak 41,048 (72,74%) akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya
8. Jumlah akseptor KB Baru tahun 2019 adalah 7.667 (80,4%)
9. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebesar 2 Orang.
10. Keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.247 ASN Perempuan (68,42%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 1.960 orang (31,58%)
11. Terdapat 70 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Laki-laki

12. Jumlah Lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota yang potensial sebanyak 30 orang dan lansia terlantar atau tidak potensial adalah sebanyak 2.984 orang
13. Angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebanyak 3.584 orang .Penyandang disabilitas laki-laki sebanyak 1.926 orang dan disabilitas perempuan sebanyak 1.658 orang
14. Keluarga miskin yang menerima bantuan sosial pangan (RASTRA-BPNT) TAHUN 2019 adalah 22.451 Kepala Keluarga .

IX.2 SARAN

1. Para pengambil kebijakan di Kabupaten Lima Puluh Kota di harapkan untuk mempertimbangkan isu gender dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk meningkatkan frekwensi upaya promosi kesehatan serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih optimal